

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdy Yuhana, *Kedaulatan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2020.
- Agussalim Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- B.N. Marbun, *Demokrasi Jerman*, Sinar Harapan, Bandung, 1981.
- FTI Unissula, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Pusat Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung, 2019.
- Herman dan Manan Sailan, *Pengantar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2012.
- H. Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, Lekkas Bandung, Bandung, 2019.
- Ismail Suny, *Pembagian kekuasaan Negara*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah Pasang Surut Hubungan kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T. Alumni,

Bandung, 2008.

Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Surabaya, 2004.

Muhammad Junaidi, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2016.

M. Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2007.

Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, C.V. Rajawali, Depok, 2019.

Yetty Purdiantari, *Linimasa Demokrasi*, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Jakarta, 2018.

Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016.

Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010.

Rika Syartika, *Makalah Demokrasi Indonesia*, INA-Rxiv, 2015, hlm. 2-5.

## **B. Undang-Undang**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang*

*Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2017 *tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Persusahaan*

JDIH, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota, Indonesia, 2007, [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).

Sosa Andrea, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pebagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 2007, <https://peraturan.bpk.go.id>, hlm. 7.

Kemenkeu, PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2005, <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>, diakses pada 7 juli 2021.

BPHN, Undang-Ungan No 12 Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peundang -Undangan, Indonesia, 2011, [bphn.go.id](http://bphn.go.id).

JDIH, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Indonesia, 2014, Hlm. 5, [peraturan.bpk.go.id](http://peraturan.bpk.go.id).

### **C. Jurnal**

Anajeng Esri Edhi Mahanani, *Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara*

- Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Kebijakan Publik, Surakarta, Vol. 1, 2017.
- Rein Taluke, *Kedudukan Pemerintah Daerah Dan DPRD Dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA)*, Lex Et Societatis, Manado, VI. 6, No. 4, 2018.
- Agung Cahya Kurniawan, *Perbandingan Sistem Pemerintahan Khilafa Dengan Sistem Pemerintahan Demokrasi di Indonesia*, UIN Sunan Amper Surabaya, Surabaya, Vol. 3, 2015.
- Agus Dedi, *Implementasi Prinsip-prinsip Demokrasi di Indonesia, Moderat*, Ciamis, Vol. 7, No.1, 2021.
- Abdul Rokhim, *Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dinamika Hukum , Malang, Vol. XIX, No. 36, 2013.
- Bambang Sugianto, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Daerah Dan DPRD Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014*, UNPAL, Palembang, Vol. 15, No. 3, 2017.
- Melki, *Hubungan DPRD Dan Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*, Sumatera Law Review, Padang, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Yudarti Nur, *'Analisis Mekanisme Hubungan Kerja Eksekutif Dan Legislatif Dalam Melahirkan Peraturan Daerah'*, Jurnal ilmiah, Sinjai, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Muhammad Asrianto Zainal, *Proses Pembentukan Perda*, Jurnal Hasil-

*Hasil Penelitian*, Kendari, Vol. 13 , No. 2, 2018.

#### **D. Artikel dan Sumber Lainnsya**

Maiti, dan Bidinger, “Otonomi Daerah,” 1981, hlm.13, repository.uin-suska, diakses 1 April 2021.

Repository.unpas.ac.id, Pemerintah Daerah, 2014, hlm. 36, Diakses pada 20 mei 2021.

Fauzan, Dalam Proses Pembentukan Daerah, Eprins, 2018,  
<http://eprinslip.ummgl.ac.id>.

Umami, RizaFadli, “Kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Jember,” 2014,  
<https://repository.unej.ac.id/>, Diakses 25 februari 2021.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sulthan Ageng Tirtayasa Serang, fiat jusitia, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah, 8.1 (2014), 72, <http://jurnal.fh.unila.ac.id>.

Welianto, Ari, “Pembagian Kekuasaan di Indonesia,” 2020, kompas.com,  
diakses 8 Maret 2021.

Fahri Zulfikar, Demokrasi: Pengertian, Jenis, dan Prinsip, 2021,  
detik.com, Diakses pada 19 September 2021 pukul 11.00 WIB.

Faozan Tri Nugroho, Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli Macam-macam dan Prinsipnya, 2021, m.bola.com, Diakses pada 20 September 2021 pukul 15.00 WIB.

Edward UP Nainggolan, Kepala Daerah Mau Daerah Maju, 2016, djkn.kemenkeu.go.id, Diakses pada 13 Oktober 2021.

Wikipedia, Kabupaten Samosir, 2021, Wikipedia.org, Diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

Wikipedia, 'Daftar Bupati Samosir', 2021, id.m.wikipedia.org, diakses pada 29 Oktober 2021 pukul 20.26 WIB.

Sulaiman, 'Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Serta Hak DPRD Sebagai Abdi Masyarakat', 2019, jdih.babelprov.go.id, diakses pada 15 Oktober 2021.

Serafica Gischa, 'Peraturan Daerah: Pembentukan, Kedudukan, dan Fungsi', 2020, kompas.com, diakses pada 3 Oktober 2021 pada pukul 09.00 WIB.

Cipta Karya Kabupaten Samosir, 'Profil Kabupaten Samosir', 2014, sippa.ciptakarya.pu.go.id, diakses pada 26 Oktober 2021 pukul 12.09 WIB.

Wikipedia, DPRD Kabupaten Samosir, 2019, <https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada 26 Agustus 2021, pukul 12:30 WIB.

Wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Samosir, 2

Agustus 2021.

A. Zarkasi, 'Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan', [jdih.mojokertokota.go.id](http://jdih.mojokertokota.go.id), diakses pada 10 juli 2021.

Eka Sihombing, Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Urgensi dan Problematikanya), 2015, [sumut.kemenkumham.go.id](http://sumut.kemenkumham.go.id), Diakses pada 18 Oktober 2021.

Ani Sri Rahayu, 'Ruang Lingkup Peraturan Daerah', 2017, [repository.iainkudus.ac.id](http://repository.iainkudus.ac.id), hlm. 13, diakses pada 10 juli 2021.

DPRD Banjarnegara, 'Tentang DPRD', 2018, [dprd.banjarnegarakab.go.id](http://dprd.banjarnegarakab.go.id), diakses pada 25 Oktober 2021.

Serefica Gischa, 'Hubungan Pemerintah Daerah Dan DPRD', 2020, [kompas.com](http://kompas.com), diakses pada 16 Oktober 2021 .

Wawancara dengan Anggota DPRD Kabupaten Samosir, 25 Agustus 2021.

JDIH Kabupaten Samosir, Peraturan Daerah, 2021, [jdih.samosirkab.go.id](http://jdih.samosirkab.go.id), diakses pada 30 Oktober 2021 pukul 07.00 WIB.

UIN Suska Riau, 'Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah', 2016, [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id), diakses pada 1 November 2021.

Pemerintah, Tugas Wewenang kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 2014, pemerintahan.net, Diakses 27 Oktober 2021 pukul 13:20 WIB.

Reynaldo Stefa Iglesias, Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Kabupaten/Kota, 2019, hukumonline.com, Diakses pada 27 Oktober 2021, pukul 13.33 WIB.

Dandi Riskia Putra, 'Hubungan Walikota Dan DPRD Kota Yogyakarta Dalam Pembentukan Raperda Tentang Kawasan Tanpa Rokok Menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok', 2018 <<https://dspace.uui.ac.id/>>, Diakses pada 20 Agustus 2021.

Sartini Lubis, Melani Huta Barat, Muhammat Rivani Nasution, UUD 1945, 2019, hlm. 4, <https://doi.org>, Diakses pada 24 September 2021.

Fauzan, Dalam Proses Pembentukan Daerah, Eprints, 2018, <http://eprintsip.ummg1.ac.id>.